

KEBIJAKAN NON PENAL DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA LINGKUNGAN PEMBAKARAN HUTAN DAN LAHAN DI PROVINSI RIAU

INTISARI

Oleh:

Alfikri¹, Marcus Priyo Gunarto^{}**

Penelitian tesis ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis faktor penyebab yang menjadi akar permasalahan terjadinya tindak pidana pembakaran hutan dan lahan di Provinsi Riau, mengetahui dan menganalisis problematika yang dihadapi oleh Provinsi Riau terkait implementasi kebijakan nonpenal dalam menanggulangi tindak pidana lingkungan hidup pembakaran hutan dan lahan dan mengkaji dan merumuskan kebijakan nonpenal ke depan dalam menanggulangi tindak pidana lingkungan hidup pembakaran hutan dan lahan di Provinsi Riau.

Metode Penelitian dalam tesis ini bersifat normatif, empiris dan preskriptif. Bersifat normatif karena menggunakan data sekunder untuk meneliti kaidah atau norma. Bersifat empiris karena penulis melakukan penelitian terhadap kebijakan non penal dalam menanggulangi tindak pidana lingkungan hidup kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Riau. Serta bersifat preskriptif karena penelitian ini diharapkan mampu memberikan memberikan pedoman yang dapat dijadikan acuan bagi pelaksanaan kebijakan non penal dalam rangka menanggulangi tindak pidana lingkungan hidup kebakaran hutan dan lahan di masa yang akan datang.

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan, maka diperoleh tiga kesimpulan. Kesimpulan pertama menyatakan bahwa faktor penyebab menjadi akar permasalahan terjadinya tindak pidana pembakaran hutan dan lahan di Provinsi Riau antara lain terdiri dari kebiasaan masyarakat, faktor ekonomi dan juga faktor hukum. Kesimpulan kedua menyatakan bahwa problematika yang dihadapi antara lain problematika beberapa instansi yang telah diberikan tugas. problematika dari kebiasaan masyarakat dan problematika dari aspek hukum. Dan kesimpulan ketiga menyatakan bahwa kebijakan non penal ke depan dalam menanggulangi tindak pidana lingkungan hidup pembakaran hutan dan lahan di Provinsi Riau telah dituangkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Pedoman Teknis Penanggulangan Kebakaran Hutan dan/atau Lahan.

Kata kunci : Kebijakan Non Penal, Tindak Pidana Lingkungan, Pembakaran Hutan dan Lahan.

¹ Mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.

^{**} Dosen Departemen Hukum Pidana, Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

NON PENAL POLICY IN MANAGING ENVIRONMENTAL CRIME OF FOREST FIRE IN RIAU PROVINCE

ABSTRACT

By :

Alfikri*, Marcus Priyo Gunarto**

The purpose of this research is to identify and analyze the factors that are the main causes of forest and land burning criminal activity in Riau to identify and analyze the problems that Riau faces in connection with its implementation. is. Many non-criminal laws face measures to combat environmental crimes such as forest and land incinerators. Review and formulate future non-crime policies to address environmental crimes from the incineration of forests and land in Riau.

The research methods of this study are normative, empirical, and prescriptive. This is normative because it uses secondary data to look up rules and norms. It is empirical as the author conducted a study on non-criminal measures to combat environmental crimes against forest and land fires in Riau. This study is not only normative, as it is expected to provide guidelines used as a reference for the implementation of non-criminal measures related to environmental crime control against future forest and land fires.

Based on the research and analysis conducted, three conclusions can be drawn. The first conclusion is that the causative factors are the main causes of the outbreak of forest and land burning criminal activity in Riau, which in particular consists of community customs, economic factors, and even legal factors. It states. The second conclusion is that the problems we are facing include the problems of some institutions that have been outsourced to the task. Issues from local customs and issues from a legal perspective. And the third conclusion is that future non-criminal measures to address environmental crimes caused by forest and land fires in Riau are the first of the 2019 Riau Regional Ordinance on Technical Guidelines for Forest and/or Land Fires. It states that it was established in the issue.

Keywords : Non Penal Policy, Environmental Crimes, Forest Fire.

* Student of the Master of Law Study Program, Faculty of Law, Gadjah Mada University.

** Lecturer of Criminal Law Department, Master of Law Study Program, Faculty of Law, Gadjah Mada University